



# CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation  
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang  
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142  
Email: febiuwg@gmail.com



## DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: MODEL KONSEPTUAL

Muhammad Fadhly Rizky Octavio<sup>1</sup>, Dekar Urumsah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, email: 19919038@Students.uii.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, email: dekar.urumsah@uui.ac.id

### **Abstract**

*The purpose of this research is to provide research model of local government size, financial reporting quality, and e-Government maturity that affect the level of transparency and accountability of local governments in Indonesia. The research model is developed by using the legitimacy theory and agency theory. This study uses a conceptual model approach based on articles from relevant previous studies. This conceptual research model is expected to provide an overview of what factors can affect the level of transparency and accountability in Indonesian local governments.*

**Keywords:** *Accountability, Maturity of e-Government, Quality of Financial Reports, Size of Local Government, Transparency.*

## **DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: MODEL KONSEPTUAL**

---

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang diberikan amanah oleh masyarakat memiliki tanggung jawab dalam hal *Governance pemerintahan*. Dilansir dari CNN Indonesia dalam berita onlinenya yang berjudul “*Debat Pemungkas Pilgub Jatim Soroti Tata Kelola Pemerintahan*” saat ini masyarakat sudah sadar bawa sebuah *Governance* yang baik diperlukan untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya sebuah *Governance* yang baik maka pejabat pemerintahan perlu melaksanakan tuntutan tersebut, hal ini dikarenakan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah (Asa, 2021). Masyarakat sebagai salah satu *stake holder* pemerintah menginginkan *Governance* yang demokratis. Hal ini mendorong pentingnya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah daerah dengan lebih banyak pemaparan informasi keuangan maupun non keuangan yang andal (Adiputra, *et al.*, 2018). Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan elemen prinsip *Good Governance*.

*Good Governance* sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada prinsipnya *Good Governance* merupakan sebuah penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab dan solid. Hal ini yang menjadikan *good governance* sejalan dengan prinsip demokratis yang dalam pelaksanaannya untuk menghindari dari tindakan korupsi dan menjalankan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2018). Sebuah pedoman berkaitan dengan *good public governance* telah diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Di dalam kebijakan tersebut setidaknya terdapat lima asas yang dapat diterapkan di dalam pemerintahan termasuk asas transparansi dan akuntabilitas. Menurut Wilopo (2017) transparansi dan akuntabilitas mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang terbuka sehingga mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Keterbukaan informasi dan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran penting terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan meminimalisir serta mencegah terjadinya tindakan menyimpang termasuk korupsi di lingkungan pemerintah daerah (Adiputra.*et al.*, 2018).

Maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah menjadikan isu transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat. Saat ini masyarakat mempertanyakan dan menuntut pemerintah untuk mempublikasikan segala aktifitas dan program yang telah dilakukan. Tindakan korupsi yang dilakukan sangat merugikan negara ditambah Pandemi *Covid-19* saat ini yang menjadikan ekonomi negara mengalami keterpurukan. Oleh sebab itu dengan adanya masa sulit ini pemerintah diharapkan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara dan perlunya *governance* yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan (Zeyn, 2011). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyelenggaraan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dan penggunaannya dapat tepat sasaran (Astrid, 2021).

Sebagai gambaran bahwa sebuah akuntabilitas serta transparansi sangat diperlukan yaitu dengan terjaringnya beberapa pejabat negara atas kasus korupsi. Dilansir dari CNN Indonesia (2021) pada tahun 2021 bupati Musi Banyuasin yaitu Dodi Reza Alex Noerdin tertangkap tangan dalam tindakan korupsi beberapa proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dana yang di korupsi berasal dari APBD yang digunakan untuk membiayai beberapa proyek pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dari kasus tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pentingnya *Governance* yang baik termasuk di dalamnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabel (Gunawan, 2016).

Penelitian sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Dengan menggunakan beberapa teori yaitu teori agensi dan teori legitimasi (Adiputra, *et al.*, 2018; Istikomah, 2017; Trisnawati, 2014). Teori

## **DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: MODEL KONSEPTUAL**

---

agensi sendiri berkaitan hubungan agen dan prinsipal, agen dalam hal ini adalah kepala daerah dan jajarannya, sedangkan prinsipal merupakan pemberi amanah yaitu masyarakat. Dalam teori ini prinsipal memberikan tuntutan kepada agen untuk memberikan kinerja dan *Governance* yang baik dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel (Istikomah, 2017). Teori lainnya yaitu teori legitimasi, berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan aturan serta harapan masyarakat (Adiputra, *et al.*, 2018).

Ukuran Pemerintah daerah bisa berpotensi menjadi salah faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadapnya terwujudnya prinsip transparan dan akuntabel pada pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat ditinjau dari aspek aset yang dikuasai. Dengan semakin besar aset yang dikuasai, maka menjadikan sumber daya yang dimiliki besar. Hal ini dapat menjadikan dorongan untuk melakukan pengawasan yang ketat, sehingga dengan pengawasan yang ketat akan meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitasnya (Wilopo, 2017). Tidak hanya ukuran pemerintah daerah akan tetapi juga kualitas laporan keuangan dimungkinkan berperan terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan kualitas keuangan yang baik akan memungkinkan mendapatkan opini WTP oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dengan keterbukaan informasi dan pengungkapan yang sudah baik dan tidak terjadi kesalahan yang material. Oleh sebab itu dengan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan yang baik maka prinsip transparan dan akuntabel dapat terwujud (Adiputra *et al.*, 2018).

Dukungan teknologi tidak dipungkiri memungkinkan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah daerah, salah satunya dengan penerapan dan peningkatan *e-Government* yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin matangnya sistem *e-Government* yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan sebuah dukungan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas (Pina *et al.*, 2009). Setidaknya terdapat 5 pilar yang dapat mengategorikan kematangan *e-Government* pemerintah daerah yaitu katalog, komunikasi, transaksi, terintegrasi, dan partisipasi. Dengan penerapan 5 pilar ini maka dukungan peningkatan penerapan transparansi dan akuntabilitas dapat semakin baik (Fietkiewicz *et al.*, 2017).

Adiputra, *et al* (2018) pada penelitiannya memfokuskan keterkaitan faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pemerintah daerah. Penelitian Gunawan (2016) berfokus terhadap peran e-Budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dari penelitian sebelumnya, masih sangat terbatas yang mengajukan konseptual model tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan kematangan *e-Government* yang berpengaruh baik terhadap transparansi maupun akuntabilitas. Diharapkan model konseptual ini dapat menjadi model bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan mendeskripsikan antara agen yaitu pemerintah daerah dan prinsipal yaitu masyarakat. Jensen (1976) mengemukakan bahwa teori agensi merupakan sebuah hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang dapat diilustrasikan satu orang atau lebih dalam hal ini prinsipal mempekerjakan orang lain atau seorang agen yang bertujuan untuk melakukan beberapa pelayan kepada prinsipal. Prinsipal memberikan delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan juga berhubungan dengan penyelesaian dua masalah dalam hubungan keagenan. Masalah pertama yaitu masalah keagenan yang timbul apabila pertentangannya agen dan prinsipal berkaitan dengan keinginan atau tujuan. Masalah ini membuktikan bahwa prinsipal tidak dapat memvalidasi apakah agen telah berperilaku dengan tepat. Masalah kedua, berkaitan dengan pembagian risiko yang muncul ketika

## **DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: MODEL KONSEPTUAL**

---

prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsipal dan agen mungkin lebih menyukai tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda (Eisenhardt, 1989).

### **Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Teori Legitimasi berkonsep bahwa seorang manajer memiliki keharusan untuk memberikan kinerja terbaiknya. Hal ini disebabkan dengan dianggap baik kinerja dari seorang manajer maka organisasi yang dipimpinnya mendapat dampak kepercayaan dari masyarakat (Mathews, 1997). Deegan (2018) mengungkapkan bahwa teori ini memberikan asumsi bahwa seorang manajer perlu mengkondisikan dan memastikan bahwa kegiatan operasi organisasi yang dipimpinnya berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dampaknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut semakin kuat. Kegiatan operasi yang dilakukan sebuah organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial dan peraturan yang ada seperti pengungkapan dan pelaporan, sehingga dukungan legitimasi terhadap organisasi semakin kuat (Dowling dan Pfeffer, 1975).

### ***Good Governance***

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berisikan bahwa pemerintah daerah berkonsep desentralisasi, wewenang pengelolaan sumber daya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pengelolaan pemerintahan pada tingkat daerah, perlu diterapkan prinsip *good governance*. *World bank* mengartikan *good governance* sebagai pelaksanaan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab. Dalam *good governance* disiplin anggaran merupakan salah satu aspek yang penting, sehingga terhindarnya dari tindak pidana korupsi. Menurut *United Nations Development* (UNDP) terdapat beberapa karakteristik *good governance* diantaranya Partisipasi, Aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Oleh sebab itu dalam *good governance* pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas.

### **Transparansi**

Salah satu aspek dalam prinsip *good governance* yaitu transparansi. Jaminan aksesibilitas informasi dan kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk informasi keuangan merupakan sebuah syarat terlaksananya transparansi dalam pemerintahan. Transparansi juga memiliki arti dalam hal tersedianya kecukupan informasi dalam bentuk media yang mudah dipahami oleh penggunanya (Muhtar, 2017). Dalam mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan maka diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. UU ini mengatur dan menegaskan bahwa seluruh lembaga pemerintahan diwajibkan mengimplementasikan pemerintahan yang transparan. Dengan pemerintahan yang transparan, memungkinkan untuk pencegahan dan meminimalisir tindakan korupsi. Serta mampu meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan penjelasan manajer dalam menghasilkan output atau melakukan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Dengan demikian, akuntabilitas manajerial menyangkut pencapaian efisiensi, efektivitas fungsi dan operasional organisasi. (Siriwardhane & Taylor, 2017). Akuntabilitas publik dapat diartikan merupakan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas. Kegiatan ini menjadi keharusan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas memegang peranan penting dalam proses pemerintahan sebagai dukungan terwujudnya *good*

## **DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: MODEL KONSEPTUAL**

*governance*. Dengan Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, maka dapat meminimalisir tindak pidana korupsi sehingga semua sumber daya yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan (Imawan, 2019).

### **Ukuran Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran pemerintahan dapat diukur melalui ukuran aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Trisnawati (2014) memberikan penjelasan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat diukur dari segi aset yang dikuasai dan dimiliki. Aset pemerintah daerah adalah seluruh kekayaan daerah, yang dimiliki ataupun dikuasai oleh pemerintah daerah. Aset pemerintah daerah ini berasal dari proses pembelian serta diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang lain secara sah (Mahmudi, 2010). Aset apabila dikelola dengan baik, maka dapat membantu dalam mewujudkan kemudahan penyajian dan pengungkapan informasi kepada masyarakat (Adiputra, *et al.*, 2018). Sejalan dengan teori agensi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan yang tepat terhadap aset, sehingga harapan masyarakat akan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

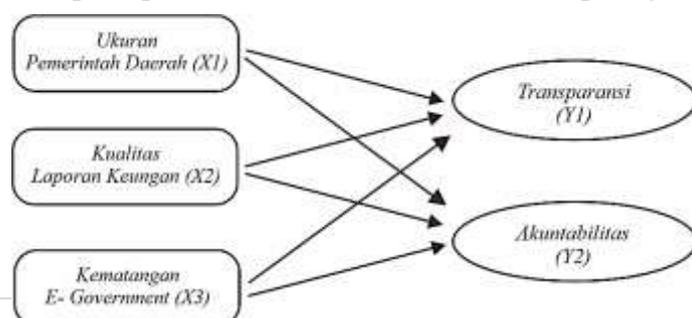
Kualitas Laporan keuangan dapat diukur melalui opini yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan/BPK (Adiputra, *et al.*, 2018). Semakin baiknya laporan keuangan yang disusun pemerintah dapat menjadi indikator bahwa pemerintah telah patuh terhadap standard yang telah ditetapkan (Wilopo, 2017). Dengan kepatuhan itu sesuai dengan teori legitimasi, maka pemerintah dianggap memberikan kinerja yang optimal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (Deegan, 2018). Dengan demikian maka dimungkinkan pemerintah akan lebih memperhatikan tingkat aksesibilitas dan juga pengungkapan terhadap informasi keuangan dan non-keuangan pemerintah daerah untuk menarik kepercayaan dari masyarakat.

### **Kematangan *e-Government***

Proses implementasi *e-Government* memiliki beberapa tahapan yang perlu dijalankan, apabila tahapan tersebut sudah dijalankan maka terciptalah sistem yang handal (Fietkiewicz, 2017). Dalam pengimplentasiannya *e-Government* dikatakan matang apabila sudah memiliki fitur yang kompleks. Kematangan dari *e-Government* dapat juga ditinjau dari aspek kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Lakka, 2015). Kematangan *e-Government* dapat diartikan seberapa jauh pemerintah di sebuah negara telah menciptakan pelayanan bersifat *online* kepada masyarakat. (Khan & Krishnan, 2019). Kematangan sebuah *e-Government* bisa jadi dapat memberikan dorongan terwujudnya akuntabilitas dan transparan. Sesuai dengan teori agensi, tekanan dari masyarakat akan timbul untuk pemerintah memberikan pelayanan yang mumpuni termasuk pengungkapan dan aksesibilitas informasi yang mudah. Hal ini lah yang mau tidak mau harus dilakukan pemerintah sebagai agen.

### **Usulan Konseptual Model**

Pada penelitian ini terdapat usulan model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia seperti yang dijelaskan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Model**

Pemerintah daerah dikatakan optimal dalam kinerjanya apabila menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah tentu saja memiliki kewajiban dan tuntutan untuk melakukan *Governance* yang baik. Sesuai dengan teori agensi, pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, maka masyarakat berhak memberikan tuntutan kinerja kepada pemerintah (Jensen, 1976). Teori legitimasi menjelaskan apabila pemerintah daerah ingin diakui memiliki kinerja yang optimal maka pemerintah tentu perlu patuh terhadap peraturan yang ada sebagai contoh Undang-Undang dan dapat memenuhi harapan yang diinginkan masyarakat (Mathews, 1997). Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi dua dari beberapa keinginan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus bisa mewujudkan dua prinsip tersebut. Adapun beberapa faktor yang dimungkinkan dapat memberikan pengaruh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah daerah yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan dan Kematangan *e-Government*.

Ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan aset yang dikuasai bisa jadi memiliki pengaruh terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini disebabkan dengan semakin besar aset yang dikelola, maka besar juga fleksibilitas pemerintah daerah tersebut menggunakan aset tersebut untuk membuat sebuah program dan infrastruktur berupa sistem yang terintegrasi yang berguna untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Trisnawati (2014) yang mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap publikasi informasi pemerintahan melalui media internet. Faktor selanjutnya yang dimungkinkan memiliki pengaruh yaitu kualitas laporan keuangan, semakin baik kualitas laporan keuangan ditinjau dari opini audit BPK maka dapat dikatakan semakin patuh terhadap peraturan dan standard yang ada.

Dengan patuh dengan sebuah peraturan maka keterbukaan informasi dan pengungkapan informasi akan terwujud karena hal ini juga diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Pada penelitian Adiputra, *et al* (2018) hasil yang ditemukan yaitu kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi. Kematangan *e-Government* juga menjadi faktor yang bisa jadi berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi. Matangnya *e-Government* pemerintah tentu memberikan dukungan administrasi dan layanan kepada masyarakat maka *eGovernment* dapat menjadi alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan dukungan *e-Government* yang matang peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat dengan mudah terwujud (Gunawan, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode kerangka penelitian konseptual. Metode ini merupakan metodologi dengan mengamati dan menganalisis segala informasi berkaitan dengan topik penelitian (Mamahit & Urumsah, 2018). Kerangka pada penelitian konseptual mencakup sebuah kombinasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Peneliti menyusun fenomena dengan mempertimbangkan aspek apa saja yang dapat mempengaruhi fenomena tersebut, peneliti juga memaparkan informasi yang terperinci yang dapat menggambarkan fenomena tersebut (Mamahit & Urumsah, 2018). Dalam menyusun penelitian kerangka konseptual menurut Mamahit & Urumsah, (2018) terdapat empat tahapan sebagai berikut:

## **DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: MODEL KONSEPTUAL**

Tahapan pertama, yaitu memilih topik yang akan digunakan untuk penelitian. Sebelum melakukan penelitian topik sudah ditentukan sebelumnya. Tahapan Kedua yaitu mengumpulkan literatur yang relevan. Cara yang dilakukan dengan mempersempit topik untuk mempermudah mengumpulkan informasi relevan. Mengumpulkan informasi yang relevan merupakan sebuah langkah penting. Hal ini dikarenakan sebagai penelitian konseptual sebagian besar didasarkan pada informasi yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Pengumpulan literatur relevan merupakan sebuah tahapan penting dalam penyelesaian sebuah penelitian. Materi-materi penelitian yang digunakan berupa artikel-artikel yang berasal dari jurnal ilmiah atau prosiding, karya ilmiah yang diterbitkan oleh seorang ilmuwan terkenal, dan bahan materi yang sama. Terdapat banyak informasi di internet namun sumber itu perlu divalidasi kebenarannya.

Tahapan Ketiga yaitu melakukan identifikasi pada variabel tertentu. identifikasi variabel berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya variabel-variabel tersebut, maka dapat memberikan lingkup penelitian baru dan dapat membantu untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan dengan penelitian. Tahapan Keempat yaitu pada tahapan ini membuat sebuah model konseptual. Pada tahapan ini sekaligus juga mengidentifikasi indikator pengukuran yang relevan dalam mendukung model konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kesenjangan pengetahuan dan memberikan informasi yang relevan.

Adapun dari penelitian ini telah dibangun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang akan digunakan pada model ini seperti tercermin dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Variabel Penelitian

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Referensi</b>
<b>Akuntabilitas</b>	Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan <b>mendapatkan Rating AA</b>	Dwi, Harpanto, & Fahrizal, (2015)
	Tersedianya Pelaporan kinerja Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan <b>mendapatkan Rating CC - B</b>	

Tabel 1. Indikator Variabel Penelitian Lanjutan

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Referensi</b>
<b>Akuntabilitas</b>	Tersedianya Pelaporan kinerja Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan <b>mendapatkan Rating CC - B</b>	Dwi, Harpanto, & Fahrizal, (2015)
	Tersedianya Pelaporan kinerja Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	

**DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA:  
MODEL KONSEPTUAL**

	(MenPANRB) dengan <b>mendapatkan Rating D - C</b>	
<b>Transparansi</b>	Jika website pemerintah daerah dapat ditemukan di halaman pertama pencarian di google dengan mengetikkan nama pemerintah daerah.	Adiputra, <i>et al</i> (2018)
	hanya tiga klik atau kurang yang diperlukan untuk melihat informasi keuangan dan non keuangan di situs web pemerintah daerah.	
	jika data keuangan dan non keuangan dapat diunduh dalam berbagai format.	
	jika ada informasi keuangan dan non-keuangan sebelumnya situs web pemerintah.	
<b>Ukuran Pemerintah daerah</b>	Total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Neraca LKPD. Total Aset = Aset Tetap + Aset Lancar +Investasi Jangka Panjang + Aset Lainnya	Adiputra, <i>et al</i> (2018)
<b>Kualitas Laporan Keuangan</b>	Opini BPK WTP	Adiputra, <i>et al</i> (2018)
	Opini BPK Non-WTP	
<b>Kematangan e-Government</b>	Adanya Kegunaan Katalog pada Website	Fietkiewicz, <i>et al</i> (2017)
	Adanya Kegunaan Komunikasi pada Website	
	Adanya Kegunaan transaksi pada Website	
	Adanya Kegunaan Interoperabilitas (integrasi) pada Website	
	Adanya Kegunaan Partisipasi pada Website	

**SIMPULAN**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan penerapan prinsip *good governance*. Desakan penerapan prinsip ini datang dari masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya *governance* yang baik, ditambah maraknya kasus tindakan korupsi yang menimpa beberapa daerah sehingga desakan kepada pemerintah semakin kuat. Dua prinsip *good Governance* cukup penting dan dibahas pada penelitian ini yaitu transparansi dan akuntabilitas. Di dalam pemerintahan perlu diwujudkan kemudahan aksesibilitas informasi dan lebih banyak pengungkapan keuangan maupun non keuangan. Dalam Undang-Undang No14 tahun 2008 jelas menegaskan bahwa setiap perangkat pemerintahan wajib memberikan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perlunya akuntabilitas yang baik terhadap pengelolaan keuangan agar penggunaannya tepat sasaran. Dengan pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas pada pemerintah daerah maka penelitian ini memberikan kerangka konseptual faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dan kematangan *e-Government*.

Penelitian ini berupa model konseptual yang menyajikan model konseptual dari faktor yang melatarbelakangi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah daerah. Penelitian ini

## **DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: MODEL KONSEPTUAL**

---

mengumpulkan beberapa teori-teori yang relevan dari artikel-artikel terkait terhadap kerangka model yang diusulkan.

### **REFERENSI**

- Adiputra, I. M., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of Local Government In Indonesia. *Asian Journal Of Accounting Research*, Volume 3, Nomor 1, Halaman 123-138.
- Amrizal, I., Gugus, I., & Yoney, W. P. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 10, Nomor 1, Halaman 156-174
- Asa (2021) *Kemendagri Dorong Aparatur Andal Kelola Keterbukaan Informasi* . (Online). Retrieved From Cnnindonesia.Com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827205335-25-686570/kemendagri-dorong-aparatur-andal-kelola-keterbukaan-informasi>. (Januari, 2022)
- Astrid., F, H, 2021. Sri Mulyani Pastikan Jaga Akuntabilitas Keuangan dalam Tangani Covid. [Online]. From: <https://www.antaraneews.com/Berita/2391021/Sri-Mulyani-Pastikan-Jaga-Akuntabilitas-Kuangan-Dalam-Tangani-Covid> [Januari, 2022]
- Deegan, C. M. (2018). Legitimacy Theory Despite its Enduring Popularity and Contribution, Time is Right for a Necessary Makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Volume 32, Nomor 8, Halaman 2307-2329.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, Volume 18, Nomor 1, Halaman 122-136.
- Dwi, A., Harpanto, G, S., & Fahrizal. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (BPK RI)*, Volume 1, Nomor 1, Halaman 21-42.
- Eisenhardt, M, K., (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy Of Management Review*, Volume 14, Nomor 1, Halaman 57-74.
- Fietkiewicz, K. J., Mainka, A., & Stock, W. G. (2017). Egovernment in Cities of the Knowledge Society. an Empirical Investigation of Smart Cities' Governmental Websites. *Government Information Quarterly*, Volume 34, Nomor 1, Halaman 75-83.
- Gunawan, & Rizky, D. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparransi dan Akuntabilitas Keunagan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Akrual Jurnal Akuntansi*, Volume 8, Nomor 1, Halaman 72-102.
- Has (2018) *Debat Pemungkas Pilgub Jatim Soroti Tata Kelola Pemerintahan*. (Online). Retrieved From Cnnindonesia.Com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180623090734-32-308292/debat-pemungkas-pilgub-jatim-soroti-tata-kelola-pemerintahan>. (Januari 2022)
- Indonesia, (2008). Keterbukaan Informasi Publik. *Undang-Undang (UU)*, No 14.
- Istikomah, & Mutmainah, K. (2017). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Ilmiah FE Unsiq*. Volume 12, Nomor 1, Halaman 1-17
- Jensen, M. C., & Mecking, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure . *Journal of Financial Economics* 3, Volume 3, Nomor 4, Halaman 305-360.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Erlangga.

**DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA:  
MODEL KONSEPTUAL**

---

- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistle-Blowing, Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. *JASF (Journal of Accounting and Strategic Finance)*, Volume 1, Nomor 2, Halaman 153-162.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mathew, J. A. (1997). Introduction to the Special Issue. *Human Relation*.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2009). E-Government Evolution in EU Local Governments: A Comparative Perspective. *Online Information Review*, Volume 33, Nomor 6, Halaman 1137-1168.
- Siriwardhane, P., & Taylor, D. (2017). Perceived Accountability for Local Government Infrastructure Assets: He Influence of Stakeholders. *Pacific Accounting Review*, Volume 29, Nomor 4, Halaman 551-572.
- Tim CNN Indoensia (2021) *Bupati Muba Alex Noerdin Dikabarkan Terjaring OTTt KPK. (Online)*. Retrieved From Cnnindonesia.Com: <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20211015235854-12-708528/Bupati-Muba-Anak-Alex-Noerdin-Dikabarkan-Terjaring-Ott-Kpk> (December 2021)
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya*, Volume 2, Nomor 2, Halaman 1-23.
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui Website. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, Halaman 61-78.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, Volume 10, Nomor 1 Halaman 152-62.